

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI
KOTA SURABAYA
(Studi Pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo)**

Ainur Rohmah

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
rainur953@gmail.com;

Rachmwati Novaria

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
nova@untag-sby.ac.id;

Indah Indartuti

Program Studi Adimnistrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endah@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang kerap kita jumpai di Kota-kota metropolitan. Munculnya anak jalanan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Dinas Sosial membentuk UPTD Kampung Anak Negeri yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan serta pembinaan pada anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Surabaya. Dengan adanya kebijakan penanganan anak jalanan tersebut jumlah anak jalanan di Kota Surabaya menurun, namun masih ada beberapa anak jalanan yang masih berkeliaran dan belum mendapatkan penanganan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya dan menganalisis faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya dengan menggunakan Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan penanganan anak jalanan pada UPTD Kampung Anak Negeri sudah cukup berhasil, bahkan beberapa anak-anak penghuni Kampung Anak Negeri sering mendapatkan prestasi. Namun terdapat faktor penghambat untuk mengimplementasikan kebijakan penanganan anak jalanan antara lain sikap dan perilaku anak-anak jalanan yang membutuhkan waktu untuk mengubah mereka agar berperilaku lebih baik lagi kedepannya, serta masih kekurangan sumberdaya manusia bagian pembina khusus dikarenakan jumlah anak-anak penghuni Kampung Anak Negeri tidak sedikit.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, Penanganan, Anak Jalanan*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan kian meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan penduduk seluruh kota di Indonesia, ternyata Indonesia masih belum bisa dipisahkan dengan permasalahan sosial yakni anak jalanan. Masih banyak anak jalanan yang berkeliaran disetiap persimpangan jalan dan tempat umum lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan antara lain faktor dari keluarga, yang mendorong anak untuk turun kejalanan dengan dikarenakan perekonomian yang rendah, faktor lingkungan dapat mempengaruhi seorang anak turun kejalanan. Anak jalanan menimbulkan dampak negatif bagi ketertiban kota dan masyarakat sekitarnya merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Kehidupan yang bebas dan tidak adanya aturan serta pengawasan dari pihak keluarga membuat anak jalanan sangat rawan terjadi tindakan kriminalitas dan mendapatkan perlakuan kurang baik.

Di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perlindungan anak dimana seorang anak yang berusia masih dibawah umur 18 tahun bahkan masih di dalam kandungan harus dijaga dan dilindungi. Dalam perlindungan anak ini merupakan upaya-upaya untuk melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta menjauhkan anak dari kekerasan dan kriminalitas.

Kebanyakan anak jalanan memilih menempati kota metropolitan, Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan yang masih terpaut masalah kesejahteraan sosial anak jalanan. Keberadaan anak jalanan biasanya ada di tempat-tempat tertentu yang sering dikunjungi banyak orang dan mereka memanfaatkan keadaan ramai atau keramaian untuk mendapatkan pemasukan seperti mengamen, ojek payung, mengemis, menjual koran dan pedagang asongan.

Tabel 1. 1 *Jumlah Anak Jalanan Di Kota Surabaya Tahun 2016-2020*

No	Tahun	Jumlah	Jumlah yang telah ditangani	Jumlah yang belum ditangani
1	2016	1.059	621	438
2	2017	1.092	704	388
3	2018	1.286	958	328
4	2019	1.586	485	1.101
5	2020	1.798	455	1.343

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya (2020)

Berdasarkan data anak jalanan di kota surabaya selama 5 tahun mengalami naik turun. Namun jumlah anak jalanan di kota surabaya dengan jumlah tertinggi berada di tahun 2020 sekitar 1.798 orang, jumlah anak jalanan yang sudah

mendapatkan penanganan dan pembinaan pada tahun 2020 sekitar 455 orang sedangkan jumlah anak jalanan yang belum mendapatkan penanganan sekitar 1.343 orang.

Untuk penanganan masalah anak penyandang masalah sosial ini, Pemerintah Kota Surabaya memiliki Perda No.6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pemerintah Kota Surabaya, 2011). Sebagai perwujudan perda tersebut maka pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk memberikan penanganan pada anak penyandang masalah sosial seperti anak jalanan, Salah satu kebijakan dari pemerintah kota surabaya dalam memberikan penanganan anak jalanan antara lain memasukkannya ke rumah singgah, tempat-tempat pembinaan yang telah disediakan (Setijaningrum, 2008).

Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai Lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menangani anak jalanan, membentuk UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo yang memiliki tugas untuk menangani anak penyandang masalah sosial. Di tempat tersebut anak-anak penyandang masalah sosial mendapatkan pelayanan serta pembinaan. Dan diperjelas dengan adanya Peraturan Walikota Surabaya No 61 Tahun 2012 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya, dimana Dinas Sosial tidak hanya merazia dan menjaring anak jalanan melainkan Dinas Sosial memiliki Langkah selanjutnya yang bermanfaat untuk anak jalanan tersebut agar tidak kembali kejalanan. Akan tetapi kebijakan tersebut belum terimplementasikan dengan baik, masih ada beberapa anak jalanan yang masih berkeliaran dan sedikitnya daya tampung di UPTD Kampung Anak Negeri. Berdasarkan informasi, di UPTD Kampung Anak Negeri ini hanya menampung sekitar 40 anak jalanan sedangkan pada kenyataannya jumlah anak jalanan di Kota Surabaya lebih dari 35 orang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah (1) kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan (2) rangkaian konsep dan asa yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau sebagai garis haluan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Publik adalah orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dsb). Sehubungan dengan kebijakan, Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok, pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan, serta kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam sebuah proses pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan kedua dalam proses kebijakan publik setelah formulasi kebijakan disepakati, kemudian dilakukan implementasi. Secara sederhana proses implementasi sering diartikan

sebagai tindakan nyata yang dilakukan pemerintah sebagai hasil dari pada formulasi sebuah kebijakan. Karena tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn mengemukakan 6 variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan (Ukuran dan Tujuan Kebijakan)

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan teratur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber Daya

keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, karena dengan adanya sumberdaya dapat memperlancar administrasi Implementasi Kebijakan. Sumberdaya ini terdiri atas : Sumberdaya Manusia, Fasilitas, dan Dana.

3. Hubungan Antar Organisasi

Koordinasi atau hubungan antar organisasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak- pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para age pelaksananya

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong/memberi dukungan bagi keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

6. Disposisi (Sikap) Implementor

Disposisi implementor (pelaksana) mencakup respons (reaksi) implementor terhadap kebijakan, akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses implementasi kebijakan secara mendalam dengan melihat fakta-fakta yang ada. Penelitian ini akan berfokus pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya (Studi Pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Kota Surabaya), serta menganalisis faktor-faktor menghambat penerapan kebijakan penanganan kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya. Fokus penelitian disesuaikan

dengan indikator teori dari Van Meter dan Van Horn yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Hubungan Antar Organisasi
4. Karakteristik Para Pelaksana
5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
6. Disposisi Implementor

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial Kota Surabaya dan di UPTD Kampung Anak Negeri di Jl. Wonorejo Timur No. 13 Kota Surabaya. Peneliti memilih tempat tersebut karena UPTD Kampung Anak Negeri merupakan suatu Lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Kota Surabaya yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani dan menampung serta memberikan bimbingan kepada anak jalanan di Kota Surabaya.

D. PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Di Kota Surabaya (Studi Pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya)

Penanganan anak jalanan di Kota Surabaya memberikan dampak bagi pemerintah Kota Surabaya, untuk itu dibutuhkan adanya implementasi kebijakan terkait penanganan anak jalanan. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang memiliki 6 indikator yakni :

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran Kebijakan dibutuhkan untuk mengarahkan para pelaksana dalam meng-implementasi suatu kebijakan. Dan para pelaksana kebijakan harus paham dengan standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri, hal ini dilakukan agar sesuai dengan aturan yang sudah direncanakan dari awal.

Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo serta seluruh pegawai semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas UPTD Kampung Anak Negeri yang tertera pada Perwali Surabaya No 61 Tahun 2012 mengenai penanganan anak jalanan di Kota Surabaya dengan memberikan pelayanan dan memeberikan pembinaan untuk anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial diantaranya anak jalanan, anak terlantar dan anak nakal. Para pegawai UPTD Kampung Anak Negeri sendiri pun juga paham dan mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan pembinaan yang terbaik mulai untuk anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kampung Anak Negeri Wonorejo.

Kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Anak Negeri antara lain minat dan bakat seperti pembinaan music, silat, tinju, balap sepeda, Lukis. Beberapa anak-anak yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Anak Negeri mereka telah berhasil meraih prestasi, pada tahun 2017 pernah memenangkan juara satu pertandingan tinju, juara satu tapak suci dan juga pernah menjadi juara balap sepeda. Kegiatan-kegiatan tersebut pastinya sangat membantu para anak-anak penghuni Kampung Anak Negeri.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung dari bagaimana kemampuan para implementor dalam memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Dengan adanya sumber daya yang cukup dan memadai maka implementasi suatu kebijakan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam proses mengimplementasikan kebijakan penanganan anak jalanan yaitu sumber daya manusia, dan jika dalam sebuah organisasi kekurangan sumber daya manusia maka kegiatan-kegiatan di organisasi itu sendiri tidak akan berjalan dengan optimal.

UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo yang melaksanakan kebijakan penanganan anak jalanan pastinya membutuhkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Jumlah seluruh pegawai yang ada di Kampung Anak Negeri sekitar 16 diantaranya terdapat 3 orang yang dijadikan pembina untuk anak-anak jalanan. Kalau untuk jumlah anak jalanan sendiri sekitar 34 orang. Mengenai sumber daya manusia di UPTD Kampung Anak Negeri untuk yang khusus pembina anak-anak bisa dikatakan kurang dikarenakan jumlah anak jalanan yang dibina jauh lebih banyak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pembina, jika jumlah pembina bisa ditambah 2 atau 3 orang pasti akan lebih terbantu dan tentu saja para pembina akan berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak jalanan mendapatkan pembinaan dengan sebaik mungkin sehingga mereka merasa nyaman dan tidak kabur-kaburan saat dibina.

Hubungan Antar Organisasi

Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan para stakeholder yang terlibat. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan para stakeholder harus melakukan semua kegiatan secara bersama-sama dan saling membantu agar tidak ada hambatan dan masalah dalam proses implementasi kebijakan.

Implementasikan kebijakan penanganan anak jalanan yang dilaksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri bekerjasama dengan para stakeholder agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan. Para stakeholder di kampung anak negeri ini diantaranya yaitu Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Untuk Koordinasi ataupun Komunikasi dengan para Stakeholder sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan.

Karakteristik Para Pelaksana

Karakteristik para pelaksana yang berarti sikap dari masing-masing para pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting, dikarenakan kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para pelaksana kebijakan itu sendiri. Luas wilayah dalam mengimplementasikan kebijakan juga penting untuk menentukan para pelaksana kebijakan. Jika semakin luas cakupan implementasi suatu kebijakan, maka kemungkinan besar semakin banyak para pelaksana kebijakan yang terlibat serta memiliki karakteristik yang tepat.

Dalam hal ini UPTD Kampung Anak Negeri sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk menangani anak jalanan di kota Surabaya. Dalam hal pengawasan, Kampung Anak Negeri tentunya diawasi langsung oleh Kepala Kampung Anak Negeri, Dinas Sosial,

Pemerintah Kota Surabaya, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala di UPYD Kampung Anak Negeri Wonorejo.

Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Berikut adalah hasil analisis dari data yang telah diperoleh peneliti mengenai indikator Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri :

Mengenai lingkungan sosial, politik dan ekonomi tentu saja mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri. Kebanyakan anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial turun kejalanan dikarenakan keadaan ekonomi dan sebagai tujuan mereka adalah kota-kota besar seperti Kota Surabaya. Dengan bantuan pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Sosial maka didirikannya UPTD Kampung Anak Negeri untuk melaksanakan kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam hal ini pemerintah dan dinas sosial pastinya sangat mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan ini, dengan dukungan serta bantuannya maka implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri ini berjalan dengan baik.

Disposisi Implementor

Dalam indikator para pelaksana Terdapat 3 macam sikap para pelaksana yang sangat mempengaruhi kesepakatan dalam mengimplementasikan kebijakan antara lain : 1) para pelaksana kebijakan harus memiliki pemahaman tentang tujuan dari kebijakan sehingga mereka tau apa yang harus dikerjakan 2) sikap penolakan ataupun penerimaan dari para pelaksana (implementor) kebijakan. Para implementor bisa saja gagal dalam menjalankan implementasi kebijakan, karena mereka telah menolak tujuan suatu kebijakan tersebut, maka sebaliknya jika para implementor menerima apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut maka akan berpotensi besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil analisis data mengenai indikator Disposisi/sikap para pelaksana dapat disimpulkan bahwa UPTD Kampung Anak Negeri telah menjalankan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan dengan baik. Meskipun memiliki hambatan sumber daya yang berupa sumber daya manusia yang bagian pembina untuk anak-anak jalanan, Namun para pembina paham betul tujuan dari kebijakan tersebut, maka para pembina di UPTD Kampung Anak Negeri tetap konsisten dan siap berupaya untuk melaksanakan kebijakan penanganan anak jalanan tersebut agar berjalan optimal.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Di Kota Surabaya

Penyebab penghambatnya Implementasi Penanganan Anak Jalanan di Kota Surabaya disebabkan dengan beberapa faktor. Penulis menemukan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Di Kota Surabaya lebih tepatnya di Kampung Anak Negeri Wonorejo antara lain:

Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan akan menghambat jalannya suatu kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan pemberian pelayanan oleh pekerja sosial yaitu untuk memberi pelayanan serta pembinaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial, hanya

saja jumlah khusus pembina kurang seimbang dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo.

Anak-Anak Yang Diberikan Penanganan

Untuk mendisiplinkan atau pengkondisian anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menghuni UPTD Kampung Anak Negeri tersebut, dikarenakan memang masih tingkah anak-anak pengkondisiannya juga butuh yang khusus apalagi anak-anak sudah pernah hidup dijalanan. Sehingga untuk mendisiplinkan serta menerapkan perilaku yang baik membutuhkan waktu upaya strategi yang sesuai agar anak penyandang masalah sosial mau mengikuti kegiatan-kegiatan serta pembinaan yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan yang di laksanakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kota Surabaya dalam bidang sosial untuk memberikan pelayanan serta pembinaan untuk anak-anak penyandang masalah sosial anantara lain anak jalanan, anak terlantar dan anak nakal.

UPTD Kampung Anak Negeri bisa dikatakan cukup berhasil, namun sedikit sedikit kekurangan dalam sumber daya manusia dalam bagian pembina untuk anak-anak penyandang masalah sosial. Dari sumber daya manusia hanya ada 3 orang yang menjadi pembina khusus, sedangkan anak-anak penghuni UPTD Kampung Anak Negeri berjumlah 34 orang. Namun sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pembina di UPTD Kampung Anak Negeri akan berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak yang kita bina mendapatkan pelayanan serta pembinaan yang optimal. Dan untuk implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di kampung anak negeri ini sedikit memiliki hambatan dari anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial itu sendiri, dikarenakan kehidupan yang bebas tanpa adanya aturan yang pernah mereka jalani sehingga perlu membutuhkan waktu untuk bisa mendisiplinkan dan mengubah perilaku mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Saran

1. Diharapkan untuk keamanan atau bagian penerima tamu di UPTD Kampung Anak Negeri lebih ditingkatkan lagi untuk selalu ada ditempat tugas agar mengetahui jika ada tamu yang datang memiliki keperluan dan supaya para tamu yang datang tidak kebingungan meminta izin untuk masuk.
2. Diharapkan selaku pembina dan pegawai lebih mendisiplinkan anak-anak yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri, terkhusus dalam hal sikap dan perkataan.
3. Dan diharapkan kepada kepala uptd supaya adanya tambahan untuk khusus pembina dikarenakan jumlah anak-anak yang dibina jumlahnya banyak, agar pembina lebih terbantu lagi jika ada tambahan 2 atau 3 orang pembina.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin, M. (2014). Pembinaan Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Eprints.Upnjatim.Ac.Id.*

- Ahmad Syukron, D. R. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan Dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan E-KTP Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. *Repo.Menarasiswa.Ac.Id.*
- Aristin, R., & Azizah, R. N. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI DESA KADUARA TIMUR SUMENEPMADURA* (Vol. 8, Issue 2).
- Astri, H. (2014). KEHIDUPAN ANAK JALANAN DI INDONESIA: FAKTOR PENYEBAB, TATANAN HIDUP DAN KERENTANAN BERPERILAKU MENYIMPANG. *Jurnal.Dpr.Go.Id.*
- Ernianti, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar. *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id.*
- Firdaus. (2018). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganna Anak Jalanan Di Fly Over Makassar.*
- Hasanah, B., & Putri, L. D. (2019). Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.31314/pjia.7.2.81-93.2018>
- Hutagalung, ali akhbar. (2017). *KAJIAN KRIMINOLOGIS PERILAKU NAKAL ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI YAYASAN SETARA SEMARANG)*.
- Kawasati, I. R. (2018). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.*
- Manongga, P. K. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di kelurahan Pinokalan KOta Bitung. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id.*
- Pananrangi, A., Stia, M., Gazali, A., Apananrangi, B., & Id Abstrak, @algazali Ac. (2019). *INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK* (Vol. 2, Issue 3).
- Pemerintah Kota Surabaya. (2011). *PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA.*
- Rahmadani. (2013). *LATAR BELAKANG PENYEBAB ANAK-ANAK BEKERJA DI JALANAN.*
- Putra syarif, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan PMKS di UPTD Liponsos Keputih.*